

BAB II

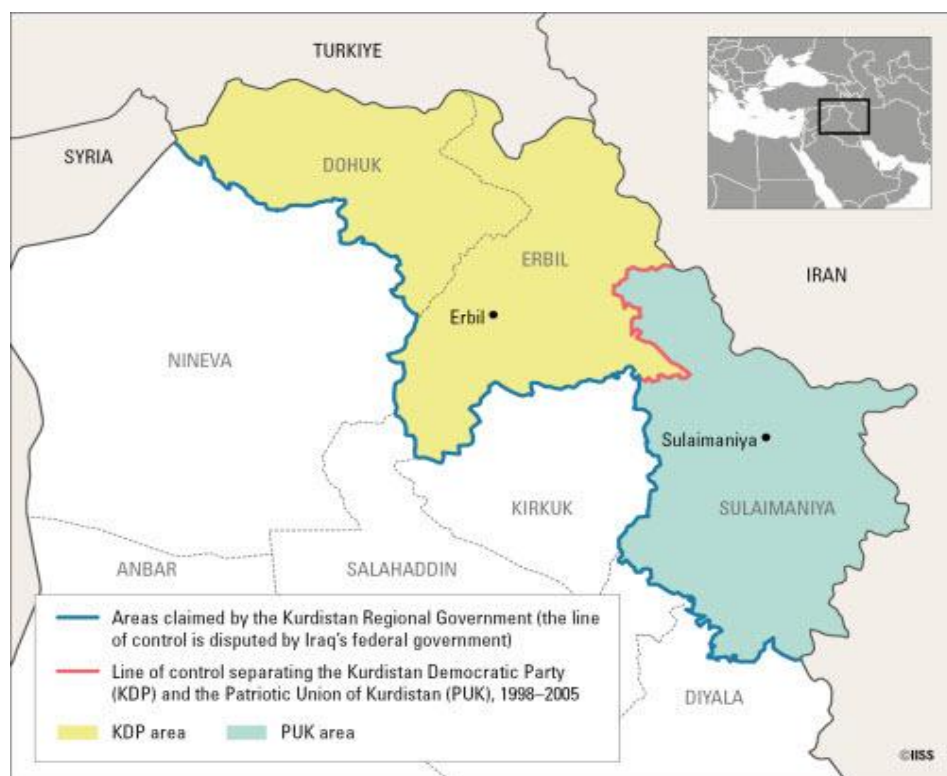
POSISI KURDISTAN IRAK DALAM GEOPOLITIK TIMUR TENGAH

Bab II memberikan gambaran umum mengenai komponen yang memiliki keterkaitan dengan subjek penelitian, yakni Kurdistan Irak, ISIS, dan Timur Tengah. Bab ini akan mendeskripsikan posisi Kurdistan Irak pasca kejatuhan ISIS di Timur Tengah sebagai variabel-variabel yang saling terkoneksi dalam strategi KRG. Konteks yang digambarkan pada bab ini tersusun dari beberapa bagian. Pembahasan diawali dengan mengupas profil Kurdistan Irak serta KRG secara mendalam melalui kaca mata historis. Setelah itu, penulis menjelaskan secara rinci hubungan internal antara KDP dengan PUK dalam KRG. Keduanya merupakan partai politik terbesar di Kurdistan Irak yang memiliki pengaruh besar. Pada bagian ketiga, penulis menjabarkan mengenai para aktor eksternal yang turut mempengaruhi geopolitik Kurdistan Irak di Timur Tengah. Pada bagian pertama, penulis akan menyajikan data geopolitik sebelum kejatuhan ISIS yang menjadi latar dari kondisi geopolitik saat ini. Kemudian, penulis menyajikan kondisi geopolitik pasca kejatuhan ISIS dari 2019 hingga *status quo* kini.

2.1. Hubungan Internal: Konflik KDP dan PUK dalam Kurdistan Regional Government (KRG)

Hubungan internal antara KDP dan PUK dalam struktur KRG merupakan faktor kunci dalam memahami dinamika politik Kurdistan Irak sejak pembentukannya hingga periode kontemporer. Konflik antara kedua partai ini berakar pada persaingan historis sejak 50 tahun yang lalu. Puncaknya, konflik berlanjut melalui perang saudara Kurdi (1994–1998). Faktor tersebut terus mewarnai hubungan mereka meskipun ada berbagai upaya rekonsiliasi (Salih & Hama, 2021).

Setelah gencatan senjata tahun 1998 yang dimediasi oleh Amerika Serikat, KDP dan PUK membagi wilayah Kurdistan Irak secara *de facto* menjadi dua administrasi. KDP menguasai Erbil dan Dohuk di barat, sedangkan PUK menguasai Sulaimaniyah dan Halabja di timur (Salih & Hama, 2021). Meskipun pada tahun 2005 kedua belah pihak menyepakati pembentukan KRG yang "resmi bersatu" dengan konstitusi regional dan pemerintahan bersama, fragmentasi politik dan militer tetap ada dalam bentuk patronase partai. Kedua partai mempertahankan kendali atas kekuatan bersenjata mereka masing-masing, yaitu Peshmerga KDP dan Peshmerga PUK. Keduanya beroperasi secara paralel dan tidak sepenuhnya terintegrasi ke dalam satu struktur komando terpadu (Arif, 2022).



Gambar 2.1. Peta Kekuasaan KDP dan PUK di Kurdistan Irak

(Sumber: Strategic Comments, 2023).

Meskipun kedua partai ini secara resmi berbagi kekuasaan dalam struktur pemerintahan bersama, konflik dan ketegangan terus muncul sebagai akibat dari patronase politik berbasis partai yang mengakar kuat. Struktur pemerintahan KRG

sesungguhnya merupakan refleksi dari sistem patronase dua partai ini. Hal tersebut dapat terlihat dari bagaimana jabatan publik, akses ke proyek pemerintah, dan keanggotaan dalam pasukan keamanan dimediasi hampir sepenuhnya oleh partai. Sistem patronase dua partai ini tidak hanya mencakup sektor publik, tetapi juga sektor swasta. Biasanya, perusahaan besar di wilayah Kurdistan harus menjalin kemitraan langsung dengan lembaga yang berafiliasi dengan KDP atau PUK. Dalam sektor keamanan, perekrutan dan pengangkatan perwira Peshmerga masih dimediasi oleh struktur partai, memperkuat loyalitas prajurit kepada partai daripada kepada institusi negara (Saleem & Skelton, 2020).

Dualisme ini berakibat pada militerisasi patronase yang memperkuat fragmentasi politik, di mana KDP mengontrol Erbil dan Dohuk. Sementara itu, PUK mengontrol Sulaimaniyah, Halabja, dan Garmian. Ketegangan politik juga tampak dalam insiden militer di Zini Warte pada April 2020. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa meskipun konflik bersenjata terbuka dapat dihindari, persaingan kontrol teritorial tetap tajam. PUK dan KDP secara efektif mempertahankan “garis demarkasi” *de facto* antara wilayah kekuasaan mereka (Dri, 2020). Di sisi lain, upaya PUK untuk mendorong desentralisasi administrasi di wilayah Sulaimaniyah setelah 2020 dilihat oleh KDP sebagai ancaman serius terhadap keutuhan KRG.

Patronase berbasis partai ini menunjukkan ketahanan luar biasa meskipun terjadi krisis ekonomi, termasuk selama anjloknya harga minyak global setelah 2014 dan dampak finansial dari pandemi COVID-19. Bahkan, dalam kondisi keuangan yang sulit, jaringan patronase dua partai tetap bertahan berkat diversifikasi sumber pendanaan. Bentuk diversifikasi yang dimaksud terdiri dari perdagangan lintas negara, pengelolaan atas perusahaan partai, dan kontrol atas sektor energi (Arif, 2022). Hal ini membuktikan bahwa stabilitas nominal KRG lebih bergantung pada keseimbangan

kekuasaan antara KDP dan PUK daripada pada reformasi institusional atau tata kelola yang demokratis.

Konflik internal ini memiliki dimensi politik, ekonomi, dan keamanan. Secara politik, KDP dan PUK bersaing untuk mendominasi lembaga-lembaga pemerintahan KRG. Lembaga-lembaga strategis tersebut antara lain adalah posisi Presiden, Perdana Menteri, dan jabatan-jabatan kementerian lainnya. KDP mengadopsi pendekatan nasionalisme Kurdi dalam kebijakan luar negeri. Salah satu contoh kebijakannya adalah mendukung upaya referendum kemerdekaan pada tahun 2017. Sebaliknya, PUK mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan moderat terhadap hubungan dengan pemerintah pusat Irak. Hal tersebut tercermin dari salah satu kebijakannya yang cenderung lebih patuh terhadap otoritas Baghdad (Danilovich, 2017).

Dalam bidang ekonomi, perbedaan visi ini tercermin dalam distribusi kekuasaan atas sumber daya alam dan pendapatan minyak. KDP mengontrol jalur ekspor minyak utama ke Turki, sementara PUK mengandalkan pendapatan dari hubungan dagang lintas batas dengan Iran. Ketidakseimbangan dalam pendapatan ini memperparah ketegangan. PUK sering mengeluhkan marginalisasi oleh pemerintah yang didominasi KDP di Erbil. Menurut mereka, KDP terlalu dominan dalam kontrol atas pengelolaan serta distribusi minyak bumi. Hal ini lantas menjadi salah satu potensi pecahnya konflik antara kedua partai tersebut (Tinti, 2021, 137-139).

Konflik ini banyak terjadi pada dinamika politik domestik Kurdistan Irak. Misalnya, setelah referendum kemerdekaan 2017 yang dipimpin KDP, wilayah-wilayah yang dikontrol PUK di sekitar Kirkuk berakhir dengan kesepakatan dengan Baghdad untuk menyerahkan kota tersebut kepada pasukan federal Irak. Hal tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan KDP. Keputusan ini menimbulkan tuduhan

"pengkhianatan" dari KDP terhadap PUK sehingga memperburuk polarisasi internal dan memperkuat fragmentasi dalam KRG (Rafaat, 2018).

Selain itu, perbedaan pendekatan terhadap kerja sama dengan kekuatan eksternal seperti Iran, Turki, dan Amerika Serikat menjadi titik pertentangan antara kedua partai. KDP cenderung lebih mendukung kehadiran Turki di Kurdistan Irak untuk melawan PKK (Tairo & Nazım, 2018). Sementara itu, PUK lebih akomodatif terhadap pengaruh Iran dan keberadaan milisi-milisi Syiah di sekitar perbatasan Kurdistan Irak (Balci, 2024) .

Dalam bidang keamanan, kegagalan untuk menyatukan kekuatan Peshmerga di bawah satu komando memperlihatkan kerentanan struktural dalam pertahanan Kurdistan. Meskipun ada upaya yang didukung oleh Amerika Serikat dan koalisi internasional untuk mengintegrasikan pasukan KDP dan PUK, resistansi internal dan ketidakpercayaan mendalam antara kedua belah pihak menghambat proses tersebut. Hal ini lantas menjadi masalah bagi keamanan Kurdistan Irak secara umum (Aziz & Cottey, 2021).

Dampak dari konflik internal KDP dan PUK sangat signifikan terhadap stabilitas politik dan keamanan Kurdistan Irak. Rivalitas ini mengurangi efektivitas pemerintahan KRG dalam mengelola pemerintahannya. Selain itu, hal tersebut memperlemah posisi negosiasi Erbil terhadap Baghdad. Apalagi, posisi tersebut dapat semakin dilemahkan campur tangan aktor-aktor eksternal, seperti Iran dan Turki dalam urusan internal Kurdistan Irak. Fragmentasi internal ini juga mengurangi kredibilitas KRG di mata komunitas internasional, sehingga menghambat upaya diplomatiknya untuk mendapatkan dukungan lebih luas (Sommer, 2021).

Secara keseluruhan, hubungan antara KDP dan PUK dalam KRG dapat digambarkan sebagai rivalitas kooperatif. Kedua partai bekerja sama dalam

mempertahankan struktur formal KRG, tetapi pada saat yang sama terus berseteru dalam membentuk arah masa depan politik Kurdistan Irak. Rivalitas ini tetap menjadi tantangan fundamental dalam pembangunan jangka panjang Kurdistan Irak. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun Erbil menikmati otonomi, kohesi internal tetap menjadi masalah yang belum terselesaikan.

2.2. Hubungan Geopolitik Kurdistan Irak Sebelum Kejatuhan ISIS (2003–2018)

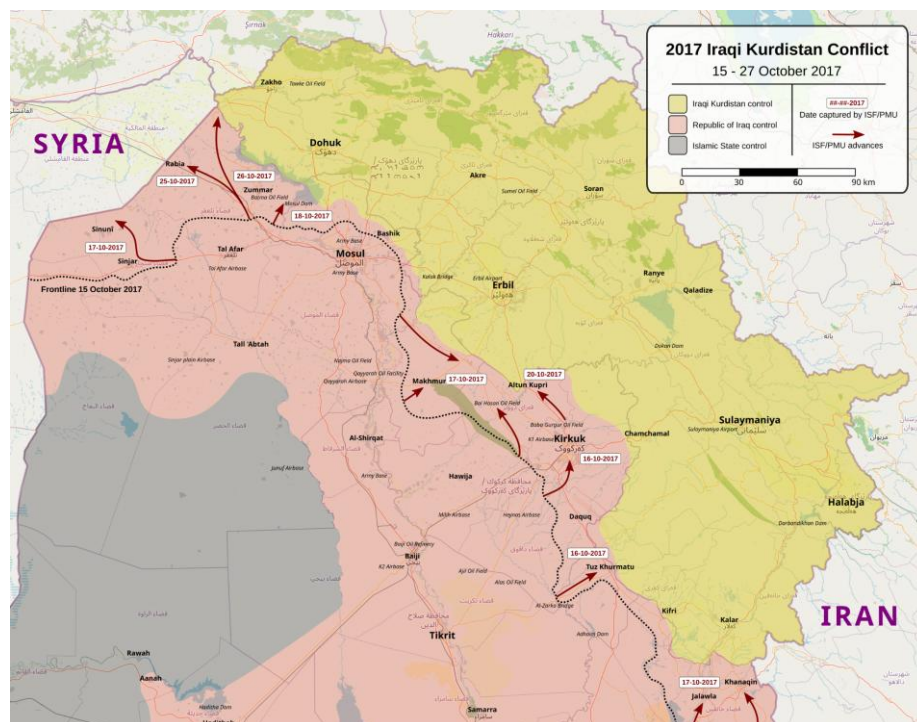
2.2.1. Pemerintah Irak

Sejak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 yang menumbangkan rezim Saddam Hussein, hubungan antara KRG dan pemerintah pusat Irak memasuki babak baru yang penuh dinamika. Konstitusi Irak tahun 2005 secara resmi mengakui otonomi Kurdistan dalam kerangka negara federal Irak. Konstitusi tersebut memberikan legitimasi politik bagi KRG untuk mengelola urusan internal, membentuk angkatan bersenjata sendiri (Peshmerga), serta melakukan hubungan luar negeri dalam batas tertentu. Pengakuan atas otonomi ini menjadi dasar legal utama yang memperkuat posisi Kurdistan Irak dalam struktur politik Irak setelah 2003 (Rafaat, 2018, pp 167-169).

Namun, hubungan antara Erbil dan Baghdad tetap diwarnai ketegangan struktural. Salah satu sumber utama konflik adalah ketidakjelasan mengenai status wilayah-wilayah sengketa, seperti Kirkuk, yang secara historis memiliki populasi Kurdi yang signifikan tetapi tidak secara resmi diintegrasikan ke dalam wilayah administrasi Kurdistan (Barbarani, 2017). Selain itu, perselisihan mengenai pengelolaan sumber daya minyak dan distribusi pendapatan juga menjadi isu sensitif. KRG mulai mengembangkan jalur ekspor minyak independen melalui Turki tanpa persetujuan pemerintah pusat, suatu langkah yang dianggap Baghdad sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan nasional (Abbassi et al., 2022). Meskipun demikian, terdapat juga periode

kerja sama pragmatis, terutama dalam kerangka politik nasional Irak. Partai-partai Kurdi, termasuk KDP dan PUK, memainkan peran penting dalam pemerintahan federal Irak, dengan mendapatkan posisi-posisi strategis seperti Presiden Irak yang berasal dari etnis Kurdi. Partisipasi ini mencerminkan keterlibatan aktif KRG dalam struktur negara Irak, sekaligus mempertahankan tuntutan otonomi maksimal di tingkat regional (Arif, 2022).

Namun, hubungan ini mulai memburuk secara signifikan sejak 2014, ketika gelombang serangan ISIS menyebabkan keruntuhan pasukan Irak di banyak wilayah utara, termasuk Kirkuk. Mengisi kekosongan ini, pasukan Peshmerga mengambil kendali atas wilayah-wilayah tersebut, memperbesar wilayah *de facto* KRG (Aziz & Cottey, 2021). Kendati peran Peshmerga dalam melawan ISIS mendapat pujian internasional, Baghdad melihat ekspansi teritorial ini sebagai ancaman terhadap integritas nasional Irak.



Gambar 2.2. Peta Konflik Antara Irak dengan Kurdistan Pada Tahun 2017

(Sumber: Wikimedia Commons, 2020).

Ketegangan memuncak pada tahun 2017, ketika KRG menyelenggarakan referendum kemerdekaan yang ditolak keras oleh pemerintah pusat dan komunitas internasional. Sebagai respons, Baghdad meluncurkan operasi militer untuk merebut kembali Kirkuk dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap KRG (Al Jazeera, 2017). Dengan demikian, periode 2003–2018 mencerminkan hubungan yang ambigu antara KRG dan pemerintah pusat Irak: di satu sisi, terdapat pengakuan formal dan kerja sama politik, namun di sisi lain, terdapat persaingan sengit terkait wilayah, sumber daya, dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

2.2.2. Iran

Secara historis, Iran telah memiliki hubungan dekat dengan partai-partai Kurdi di Irak, khususnya PUK yang berbasis di Sulaimaniyah. Hubungan ini terbentuk sejak era Perang Iran-Irak (1980–1988), ketika Iran mendukung PUK dalam melawan rezim Saddam Hussein. Pasca invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 yang mengakibatkan runtuhnya rezim Saddam Hussein, Iran melihat peluang strategis untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tetangganya ini. Iran menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan *soft power* dan *hard power* untuk menancapkan pengaruhnya di Kurdistan Irak (Jathoom, 2023).

Namun, hubungan Iran dengan KRG secara keseluruhan tidak sepenuhnya mulus, terutama dengan KDP yang berbasis di Erbil dan dipimpin oleh keluarga Barzani. KDP lebih berorientasi ke Barat, menjalin hubungan erat dengan Amerika Serikat, Israel, dan Turki. Hal ini menyebabkan Iran sering kali memandang KDP dengan kecurigaan bahwa Erbil dapat menjadi pangkalan pengaruh Barat di perbatasan barat laut Iran (Abbassi et al., 2022). Meski demikian, hubungan pragmatis tetap dipertahankan, terutama dalam bidang perdagangan lintas batas dan kerja sama keamanan terbatas.

Di bidang politik, Iran memanfaatkan kedekatan sektarian dengan kelompok Syiah di Irak, termasuk di wilayah Kurdistan. Tehran secara aktif mendukung Partai PUK sebagai *counterweight* terhadap KDP yang lebih condong ke Turki (Khalaf, 2020). Dukungan ini dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendanaan kampanye politik dan pembangunan infrastruktur keagamaan seperti madrasah dan pusat kebudayaan Syiah di wilayah yang dikuasai PUK.

Pada aspek keamanan, dokumen menunjukkan keterlibatan langsung Iran melalui pelatihan dan pendanaan kelompok milisi Syiah seperti Brigade Badr dan Popular Mobilization Forces (PMF). Kelompok-kelompok ini awalnya dibentuk untuk melawan ISIS selama periode 2014-2017, namun kemudian berkembang menjadi alat politik Iran di Irak (Cigar, 2015). Kehadiran PMF di Kurdistan Irak secara signifikan mempengaruhi dinamika kekuasaan lokal dan membatasi otonomi KRG, khususnya dalam pengelolaan sumber daya energi.

Pada aspek ekonomi, Iran memanfaatkan Kurdistan Irak sebagai pasar alternatif untuk menghindari sanksi internasional. Iran menjadi salah satu mitra dagang penting bagi KRG. Perdagangan lintas batas berkembang pesat, terutama melalui provinsi Iran seperti Kermanshah dan Ilam. Iran mengeksport berbagai barang konsumsi, bahan makanan, dan material konstruksi ke wilayah Kurdistan Irak, memperkuat ketergantungan ekonomi KRG terhadap Iran di tengah fluktuasi politik domestik Irak. Data menunjukkan volume perdagangan bilateral mencapai puncaknya \$11 miliar pada tahun 2012 (Jathoom, 2023). Iran juga membangun infrastruktur strategis seperti jalur pipa gas dan jaringan listrik yang menghubungkan wilayahnya dengan Kurdistan Irak, menciptakan ketergantungan energi (Katzman, 2019).

Krisis besar dalam hubungan Iran-KRG terjadi pada tahun 2014, ketika kemunculan ISIS mengancam keberadaan negara Irak. Iran dengan cepat menawarkan

dukungan militer kepada KRG, termasuk pengiriman penasihat militer dan senjata ke pasukan Peshmerga dalam pertempuran melawan ISIS, terutama di sekitar Kirkuk dan Erbil (Alishahi et al., 2020). Dukungan ini menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, Iran bersedia untuk bekerja sama dengan KRG demi menjaga stabilitas Irak utara dan melindungi kepentingan keamanannya sendiri.

Namun, hubungan ini kembali memburuk pada tahun 2017 ketika KRG menyelenggarakan referendum kemerdekaan. Iran, bersama dengan pemerintah pusat Baghdad dan Turki, dengan tegas menentang upaya tersebut. Bagi Iran, keberhasilan kemerdekaan Kurdistan akan menjadi preseden berbahaya yang dapat memicu gelombang separatisme di dalam negeri. Sebagai respons, Iran menutup perbatasannya dengan KRG, menghentikan penerbangan, dan meningkatkan tekanan diplomatik serta ekonomi terhadap wilayah Kurdistan Irak. Selain itu, Iran juga memberikan dukungan kepada pasukan federal Irak dan milisi Hashd al-Shaabi dalam operasi merebut kembali Kirkuk dan wilayah sengketa lainnya dari Peshmerga pasca referendum (Sofi & Salih, 2020).

2.2.3. Turki

Hubungan geopolitik antara Turki dan KRG di Irak mengalami transformasi yang signifikan selama periode 2003 hingga 2018. Pada awalnya, Turki menunjukkan sikap yang sangat skeptis dan bahkan bermusuhan terhadap otonomi Kurdi di Irak. Turki khawatir bahwa kemunculan entitas Kurdi yang kuat di Irak utara akan memperkuat tuntutan separatisme di antara komunitas Kurdi di dalam negeri, terutama yang berafiliasi dengan Kurdistan's Workers Party (PKK). Kekhawatiran ini mendorong Ankara untuk mempertahankan pendekatan militeristik terhadap perbatasan Irak utara, termasuk melakukan operasi lintas batas terhadap basis PKK di wilayah pegunungan Qandil (Gunter, 2019).

Namun, sejak 2010, terjadi pergeseran pragmatis dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap KRG. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan dan kebijakan "*zero problems with neighbors*", Turki mulai mengakui pentingnya hubungan ekonomi dan politik dengan KRG sebagai bagian dari strategi regionalnya. Faktor kunci perubahan ini adalah kebutuhan energi Turki yang terus meningkat. Kurdistan Irak, dengan cadangan minyak dan gas yang besar, menawarkan alternatif pasokan energi yang menguntungkan bagi Ankara, sekaligus memperluas pengaruh ekonominya di kawasan (Gunter, 2019).



Gambar 2.3. Peta Jalur Pipa Kirkuk-Ceyhan

(Sumber: Amwaj.media, 2023).

Kemitraan ekonomi antara Turki dan KRG berkembang pesat setelah 2007. Perusahaan-perusahaan Turki menjadi pemain dominan dalam sektor konstruksi, perhotelan, dan perdagangan di wilayah Kurdistan Irak. Salah satu tonggak penting

dalam hubungan ini adalah pembangunan jalur pipa minyak dari Erbil menuju pelabuhan Ceyhan di Turki, yang mulai beroperasi pada 2013. Jalur ekspor ini memungkinkan KRG untuk mengekspor minyak secara langsung ke pasar internasional, melewati pemerintah pusat Baghdad. Bagi KRG, hal ini memperkuat otonomi ekonominya; sedangkan bagi Turki, hal ini membuka sumber energi baru yang strategis (Tairo & Nazım, 2018).

Meskipun hubungan ekonomi antara Turki dan KRG menguat, isu keamanan tetap menjadi sumber ketegangan utama. Turki terus melancarkan operasi militer terhadap posisi PKK di Irak utara, sering kali tanpa koordinasi penuh dengan KRG atau Baghdad. Walaupun begitu, KDP yang merupakan bagian dari KRG memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Ankara. KDP bahkan dianggap secara tidak langsung mendukung operasi Turki terhadap PKK di perbatasan Irak-Turki (Dicle, 2024).

Perubahan penting lainnya terjadi pada masa krisis ISIS (2014–2017). Ketika pasukan ISIS mengancam stabilitas seluruh Irak utara, termasuk Kurdistan, Turki memperkuat hubungan strategisnya dengan KRG untuk memastikan keamanan jalur energi dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok Kurdi radikal atau aktor-aktor Syiah yang dekat dengan Iran (Jathoom, 2024). Turki memasok bantuan kemanusiaan dan dukungan logistik, meskipun keterlibatan militer resminya tetap terbatas.

Namun, hubungan ini sempat terancam pada tahun 2017 ketika KRG menyelenggarakan referendum kemerdekaan secara sepihak. Turki, bersama Iran dan Baghdad, menentang keras upaya tersebut karena khawatir efek domino terhadap separatisme Kurdi di wilayahnya sendiri. Ankara mengancam akan menutup perbatasan dan menghentikan semua kerja sama ekonomi dengan KRG (Uyanik, 2017). Meski

ancaman ini tidak sepenuhnya terealisasi, tekanan diplomatik dan ekonomi dari Turki berkontribusi pada kegagalan politik referendum tersebut dan memperlemah posisi KRG di tingkat regional.

2.2.4. Amerika Serikat

Setelah invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 yang menggulingkan rezim Saddam Hussein, KRG dengan cepat menempatkan dirinya sebagai sekutu utama Washington di Irak utara. Amerika Serikat melihat KRG sebagai mitra yang stabil, sekuler, dan relatif demokratis dalam wilayah yang dilanda kekacauan etno-sektarian. Pada fase awal pasca invasi, hubungan ini ditandai oleh dukungan politik dan keamanan. Amerika Serikat memberikan perlindungan terhadap wilayah Kurdistan melalui penguatan zona larangan terbang (*no-fly zone*) yang sebelumnya diberlakukan setelah Perang Teluk 1991. Pada tahun 2005, Konstitusi Irak yang disusun di bawah pengawasan AS secara resmi mengakui otonomi KRG sebagai entitas federal, memberikan dasar hukum yang memperkuat posisi politik Kurdistan Irak dalam negara Irak yang baru (Romano, 2010).

Secara militer, pasukan Peshmerga menerima pelatihan, peralatan, dan dukungan dari Amerika Serikat. Peshmerga dipandang sebagai salah satu kekuatan militer lokal paling efektif, berkontribusi dalam menjaga stabilitas di Irak utara. KRG juga menyediakan wilayahnya sebagai pangkalan logistik dan operasional bagi pasukan koalisi pimpinan AS, termasuk dalam operasi melawan pemberontakan Al-Qaeda dan kelompok ekstrimis Sunni lainnya (Garamone, 2022).

Secara politik, KRG berhasil membangun hubungan diplomatik informal dengan Amerika Serikat. Meski tidak ada pengakuan resmi terhadap KRG sebagai negara berdaulat, Washington membuka kantor diplomatik di Erbil dan meningkatkan interaksi politik dengan pemimpin Kurdi seperti Masoud Barzani dari KDP dan Jalal

Talabani dari PUK. Dukungan ini memungkinkan KRG untuk memperluas jangkauan internasionalnya dan mengkonsolidasikan posisinya di kancah politik nasional Irak (Doski, 2023).

Pada periode 2007–2011, saat Irak mengalami gelombang kekerasan sektarian yang parah, Kurdistan tetap menjadi wilayah paling stabil di Irak. Wilayah yang dikuasai oleh KRG seringkali disebut sebagai "*Other Iraq*" oleh media Barat. Stabilitas ini memperkuat citra positif KRG di mata para *policymaker* AS, yang menganggap wilayah Kurdi sebagai model potensial untuk demokratisasi dan pembangunan ekonomi di Timur Tengah (Jimenez & Kabachnik, 2012). Namun, hubungan ini bukan tanpa ketegangan. Amerika Serikat tetap berkomitmen pada kebijakan "*One Iraq Policy*", yang menegaskan dukungan terhadap integritas teritorial Irak (Office of the Press Secretary, 2011). Oleh karena itu, Washington selalu berhati-hati dalam mendukung aspirasi kemerdekaan penuh KRG.

Krisis besar berikutnya dalam hubungan ini terjadi setelah kemunculan ISIS pada tahun 2014. Ketika pasukan Irak runtuh di Mosul dan wilayah sekitarnya, pasukan Peshmerga Kurdi memainkan peran vital dalam menghambat laju ISIS di utara Irak. Sebagai balasannya, Amerika Serikat meningkatkan dukungan militernya kepada KRG, termasuk pengiriman senjata langsung dan dukungan udara. Peshmerga menjadi mitra kunci dalam operasi darat, sementara pasukan AS memberikan pelatihan dan intelijen (Paasche & Gunter, 2016).

Namun, hubungan yang sudah kuat ini kembali diuji pada tahun 2017 ketika KRG melaksanakan referendum kemerdekaan secara sepihak. Meski hubungan historisnya dekat dengan Kurdi, Amerika Serikat menolak mendukung referendum tersebut dan menegaskan kembali komitmennya terhadap kesatuan Irak. Washington memperingatkan KRG bahwa referendum tersebut dapat melemahkan perjuangan

melawan ISIS dan mengganggu stabilitas Irak yang rapuh (Nauert, 2017). Ketika Baghdad melakukan operasi militer untuk merebut kembali Kirkuk dan wilayah sengketa lainnya dari tangan Peshmerga, Amerika Serikat memilih untuk tetap netral dan tidak campur tangan, yang mengecewakan banyak pemimpin Kurdi (Noack, 2017).

Meskipun ketegangan meningkat setelah referendum, Amerika Serikat tetap mempertahankan hubungan kerja sama militer dan keamanan dengan KRG, khususnya pada saat perang melawan sisa-sisa ISIS. Washington terus melihat Erbil sebagai mitra penting dalam menjaga stabilitas di Irak utara dan sebagai bagian integral dari strategi Amerika di Timur Tengah (Paasche & Gunter, 2016).

2.2.5. Israel

Dari sudut pandang Israel, Kurdistan Irak merupakan mitra non-negara terdekat di Timur Tengah yang mempunyai kepentingan strategis dalam menghadapi rezim-rezim Arab nasionalis, Iran, dan kelompok-kelompok Islamis radikal. Selain itu, identitas Kurdi yang sekuler dan moderat dianggap lebih kompatibel dengan visi Israel untuk stabilitas regional berbasis pada pluralisme etnis dan agama (Khadim, 2021). Oleh sebab itu, Israel secara konsisten mendukung aspirasi otonomi dan bahkan kemerdekaan bangsa Kurdi. Walaupun begitu, dukungan ini diberikan secara tidak formal dan tidak melalui jalur diplomatik resmi (Khosravi et al., 2016).

Dalam bidang politik, Israel menjalin hubungan secara diam-diam dengan para elit politik Kurdi, khususnya dengan pimpinan Kurdistan Democratic Party (KDP) yang berbasis di Erbil dan dipimpin oleh keluarga Barzani. Sejak lama, keluarga Barzani memiliki sejarah hubungan dengan Israel, bermula sejak 60 tahun yang lalu. Saat itu, Israel mendukung pemberontakan Kurdi melawan pemerintah pusat Irak yang dipimpin oleh rezim Arab nasionalis. Hubungan tersebut diperkuat setelah 2003, dengan

dilakukannya kontak diplomatik tidak resmi, koordinasi intelijen terbatas, serta dukungan politik di forum internasional (Quitaz, 2023).

Dalam bidang ekonomi, Israel secara tidak langsung menjadi salah satu konsumen utama minyak mentah dari Kurdistan Irak. Setelah KRG mulai melakukan ekspor minyak secara independen ke pasar internasional melalui jalur pipa ke Turki pada tahun 2010, laporan-laporan media menunjukkan bahwa sebagian besar minyak tersebut dikirim ke Israel melalui perantara di Mediterania (Amwaj.media, 2020). Meskipun pihak resmi KRG dan Israel tidak pernah mengakui secara terbuka perdagangan ini, data ekspor menunjukkan bahwa Israel membeli sekitar 77% minyak ekspor KRG pada periode tertentu, memberikan sumber pendapatan vital bagi KRG di saat hubungan dengan Baghdad memburuk (The Jerusalem Post, 2015).

Dalam bidang keamanan, ada indikasi kuat bahwa Israel memberikan bantuan intelijen dan pelatihan keamanan terbatas kepada pasukan Kurdi, khususnya unit-unit elit Peshmerga, meskipun bantuan ini dilakukan melalui jalur-jalur tidak langsung untuk menghindari reaksi keras dari Baghdad dan negara-negara tetangga (Younge, 2004). Israel memandang penguatan kemampuan militer Kurdi sebagai bagian dari upaya regional untuk menghadang pengaruh Iran dan mencegah munculnya kekuatan-kekuatan Islamis ekstremis di Irak utara (Frantzman, 2015).

Namun, hubungan antara keduanya bersifat rahasia, mengingat politik Timur Tengah yang sangat sensitif. Israel menyadari bahwa keterlibatan terbuka dengan KRG dapat memperburuk posisi internasional Kurdi dan memicu reaksi negatif dari negara-negara tetangga seperti Turki, Iran, dan Suriah. Apalagi, semua negara tersebut memiliki populasi Kurdi besar dan menolak keras ide kemerdekaan Kurdi (Khadim, 2021).

Krisis besar dalam hubungan ini terjadi pada tahun 2017, ketika KRG mengadakan referendum kemerdekaan. Israel secara terbuka menjadi satu-satunya negara di dunia yang mendukung referendum tersebut secara eksplisit. Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa Israel "mendukung upaya sah bangsa Kurdi untuk mendapatkan negara sendiri" (Heller, 2017). Dukungan ini memperkuat persepsi di kawasan bahwa gerakan kemerdekaan Kurdi adalah proyek geopolitik yang didukung Barat dan Israel. Hal tersebut kemudian dijadikan alasan oleh Baghdad, Tehran, dan Ankara untuk secara bersamaan menekan KRG setelah referendum berlangsung (Andoni, 2017).

Meskipun dukungan moral Israel terhadap aspirasi Kurdi penting secara simbolis, dalam praktiknya Israel tidak dapat memberikan dukungan militer atau diplomatik nyata untuk mempertahankan hasil referendum tersebut. Hal ini menunjukkan batasan strategis hubungan Israel–KRG: sementara ada kedekatan nilai dan kepentingan, realitas politik kawasan membatasi sejauh mana Israel dapat mengaktualisasikan dukungan tersebut (Naghi, 2017).

2.3. Hubungan Geopolitik Kurdistan Irak Pasca Kejatuhan ISIS (2019–2025)

2.3.1. Pemerintah Irak

Setelah tahun 2018, hubungan antara KRG dan pemerintah pusat Irak tetap diwarnai ketegangan yang berkelanjutan, meskipun terdapat beberapa upaya rekonsiliasi. Periode ini dimulai dengan kondisi setelah referendum kemerdekaan 2017, di mana Baghdad mengambil kembali kendali atas wilayah-wilayah strategis seperti Kirkuk dan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap KRG, termasuk penghentian transfer anggaran nasional (International Crisis Group, 2019).

Pada awal 2019, terjadi beberapa upaya dialog antara Erbil dan Baghdad untuk menormalisasi hubungan. Kesepakatan parsial dicapai mengenai pembagian pendapatan minyak. Dalam kesepakatan tersebut, KRG setuju untuk menyerahkan sebagian dari hasil ekspor minyaknya ke pemerintah pusat sebagai imbalan atas kembalinya sebagian alokasi anggaran federal (Rudaw, 2019). Meskipun demikian, implementasi kesepakatan ini berjalan lambat dan sering mengalami kendala karena banyaknya perselisihan antara kedua pihak.

Faktor utama yang terus memicu ketegangan adalah pengelolaan sumber daya energi. Pemerintah pusat menuntut kontrol penuh atas produksi dan ekspor minyak di seluruh wilayah Irak, termasuk di wilayah Kurdi. Hal ini didasari oleh keputusan Mahkamah Agung Irak pada tahun 2022 yang menyatakan bahwa hukum minyak dan gas regional Kurdistan tidak konstitusional (Smeekens & Keil, 2022). Sebagai respons, KRG tetap mempertahankan jalur ekspor independennya melalui Turki, meskipun Erbil menghadapi tekanan hukum dan diplomatik dari Baghdad. Perselisihan ini semakin memperumit hubungan finansial antara KRG dan pemerintah pusat, serta memperburuk kondisi ekonomi di wilayah Kurdistan (Mohammed & Ahmed, 2024).

Di sisi lain, ketegangan juga terjadi dalam bidang keamanan. Meskipun ada kerja sama terbatas dalam upayanya untuk menuntaskan ISIS, tetapi koordinasi militer antara Peshmerga dan tentara Irak tetap lemah dan seringkali terhambat. Hal ini disebabkan oleh kecurigaan antara keduanya (Aziz & Cottey, 2021). Selain itu, dinamika hubungan ini semakin dipersulit oleh intervensi aktor eksternal, terutama Iran dan Turki. Iran mendukung Baghdad dalam memperketat kendali atas wilayah Kurdi, sementara Turki menggunakan pengaruh ekonominya atas KRG untuk menekan kerja sama keamanan terhadap kelompok PKK. KRG berada dalam posisi sulit, terjepit

antara tuntutan Baghdad, tekanan Iran, dan kalkulasi geopolitik dengan Turki dan Amerika Serikat (Sommer, 2021).

Meski demikian, sejak 2023, terdapat indikasi normalisasi hubungan secara perlahan. Hal ini didasari oleh keputusan pragmatis antara keduanya untuk mengurangi beban masalah masing-masing. KRG dan pemerintah pusat mulai bekerja sama lebih erat dalam pengelolaan ladang minyak Kirkuk dan berbagi pendapatan secara lebih transparan, meskipun tetap diwarnai ketegangan politik (Rojhelati, 2023). Kerja sama ini sebagian didorong oleh kebutuhan bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis regional yang lebih luas, termasuk dampak dari gejolak di Suriah dan dinamika dalam hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat (Nicola, 2024).

Secara keseluruhan, hubungan geopolitik antara Kurdistan Irak dan pemerintah pusat Irak dari 2018 hingga 2025 mencerminkan pola fluktuasi antara ketegangan dan pragmatisme. Walaupun konflik struktural tetap mendominasi, terdapat juga ruang untuk kerja sama ad hoc dalam isu-isu strategis tertentu, terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Relasi ini menjadi salah satu faktor penting yang membentuk arah masa depan stabilitas politik dan teritorial Irak secara keseluruhan.

2.3.2. Iran

Setelah kekalahan ISIS, hubungan Iran-Kurdistan Irak memasuki fase baru yang lebih kompleks. Dokumen menunjukkan bagaimana fragmentasi politik internal KRG semakin diperparah oleh persaingan antara KDP dan PUK (Jaff, 2023). Iran terus mendukung PUK sebagai alat untuk menjaga pengaruhnya, sementara di saat yang sama meningkatkan tekanan terhadap otonomi KRG. Lalu, setelah referendum kemerdekaan KRG pada tahun 2017 yang gagal, Iran terus memperkuat pendekatannya untuk mengendalikan dan membatasi ruang manuver KRG. Iran mendukung

pemerintah pusat Irak dalam mengambil alih kembali wilayah sengketa seperti Kirkuk, serta memperkuat kehadiran milisi-milisi Syiah, khususnya PMF. Melalui PMF dan jalur politiknya di Baghdad, Iran berupaya membatasi gerakan separatist Kurdi dan mengendalikan jalur komunikasi serta logistik di wilayah strategis antara Irak, Iran, dan Suriah (Mandel, 2025).

Meskipun hubungan perdagangan lintas batas tetap berlanjut, ketergantungan KRG terhadap produk-produk Iran mengalami kendala akibat sanksi ekonomi yang dijatuhkan terhadap Iran oleh Amerika Serikat sejak 2018. Turunnya kapasitas ekspor Iran menyebabkan berkurangnya volume perdagangan ke Kurdistan Irak (Dorgambide, 2024). Hal ini kemudian mendorong KRG untuk mulai mencari diversifikasi sumber perdagangan.

Dalam bidang keamanan, Iran menunjukkan sikap yang lebih agresif terhadap wilayah Kurdistan Irak pasca kejatuhan ISIS. Iran secara berkala melancarkan serangan rudal dan artileri lintas batas terhadap kelompok oposisi Kurdi Iran, seperti Kurdistan Free Life Party (PJAK) yang bermarkas di wilayah perbatasan pegunungan Kurdistan Irak. Serangan ini sering dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah KRG dan menyebabkan ketegangan diplomatik, sekaligus memperlemah kedaulatan *de facto* KRG di wilayah perbatasannya (Iddon, 2022). Tindakan Iran ini didasari oleh kekhawatiran bahwa wilayah KRG dapat digunakan sebagai basis operasi oleh kelompok oposisi Kurdi Iran yang mengancam keamanan domestik Tehran (Alaaldin, 2023).

Tahun 2022 menjadi titik penting ketika Mahkamah Agung Irak memutuskan mencabut hak ekspor minyak independen KRG. Keputusan ini, tidak lepas dari pengaruh Iran yang mendorong integrasi kebijakan energi Kurdistan dengan Baghdad. Iran mendukung upaya Baghdad untuk memperketat kontrol terhadap ekspor minyak

dari wilayah KRG. Iran melihat kontrol terhadap sumber daya energi KRG sebagai instrumen strategis untuk memperlemah otonomi ekonomi Kurdistan dan menjaga dominasi Baghdad atas seluruh wilayah Irak (Rojhelati, 2023).

Perkembangan regional turut mempengaruhi dinamika ini. Jatuhnya rezim Assad di Suriah tahun 2025 mendorong Iran untuk lebih fokus mempertahankan "koridor darat" yang melintasi Irak (Sari, 2021). Dokumen menunjukkan bagaimana PMF yang didukung Iran semakin menguat posisinya di Irak Utara, membatasi ruang gerak KRG (Buoninconti & Giurleo, 2024). Persaingan dengan Turki juga semakin intens, dimana kedua negara menggunakan kelompok lokal (KDP vs PUK) sebagai *proxy* dalam memperebutkan pengaruh (Najm & Dawod, 2024).

2.3.3. Turki

Memasuki periode 2019–2025, hubungan geopolitik antara Turki dan KRG tetap mempertahankan sifat pragmatisnya, namun menunjukkan dinamika baru yang lebih kompleks dan saling menekan. Setelah kegagalan referendum kemerdekaan Kurdistan pada 2017, posisi politik dan ekonomi KRG melemah. Hal tersebut membuat ketergantungan terhadap Turki semakin meningkat, khususnya dalam sektor perdagangan dan ekspor minyak. Turki tetap menjadi jalur vital bagi ekspor minyak KRG ke pasar global melalui pelabuhan Ceyhan (Stansfield, 2019). Dengan demikian, Ankara dapat mempertahankan *leverage* ekonomi yang signifikan terhadap Erbil.

Pada awal periode ini, hubungan Turki–KRG relatif stabil, ditandai dengan kelanjutan kerja sama ekonomi intensif. Perusahaan-perusahaan Turki tetap mendominasi sektor infrastruktur, perdagangan, dan energi di wilayah Kurdistan Irak. Ankara, yang tengah berusaha mengamankan sumber energi di tengah dinamika global, berupaya menjaga stabilitas hubungan ini. Namun, kerja sama ekonomi tersebut tidak berarti absennya ketegangan, terutama dalam bidang keamanan (Alaca, 2021).

Isu utama dalam hubungan ini tetap berfokus pada kehadiran PKK di wilayah pegunungan utara Kurdistan Irak. Turki meningkatkan operasi militernya terhadap milisi tersebut dalam *Operasi Claw-Tiger* dan *Operasi Claw-Eagle*, yang diluncurkan sejak 2019 (Aliyev, 2020). Operasi-operasi ini tidak hanya menargetkan basis PKK di Pegunungan Qandil, tetapi juga memperluas zona kontrol militer Turki di beberapa area perbatasan Irak. Turki bahkan membangun pangkalan-pangkalan militer permanen di dalam wilayah Kurdistan Irak tanpa persetujuan resmi Baghdad atau Erbil, memicu ketegangan diplomatik (Reuters, 2020).

Sikap KRG terhadap operasi-operasi Turki ini bersifat ambivalen. Di satu sisi, KDP, yang mengontrol Erbil dan Dohuk, cenderung membiarkan operasi militer Turki sebagai bagian dari upaya menjaga hubungan strategis dengan Ankara. Bahkan dalam beberapa kasus, pasukan keamanan lokal Kurdi dituduh menekan elemen-elemen PKK di dalam wilayah mereka sendiri. Di sisi lain, keberadaan militer Turki yang semakin intensif memicu sentimen anti-Turki di kalangan masyarakat Kurdi, khususnya di wilayah-wilayah yang terkena dampak serangan udara dan operasi darat, seperti di distrik Zakho dan Amedi (Okuducu, 2024).

Dalam bidang politik, hubungan Turki–KRG menjadi lebih instrumental. Turki berupaya memanfaatkan pengaruhnya terhadap KRG untuk menahan aspirasi separatis di Suriah utara (Rojava), dengan mengharapkan KRG untuk tidak mendukung milisi YPG yang dianggap Turki sebagai perpanjangan PKK. Tekanan ini membuat KRG, khususnya KDP, mengambil posisi lebih hati-hati dalam isu Kurdi Suriah, berusaha menghindari konfrontasi langsung dengan Ankara (Balanche, 2023).

Pada level ekonomi, kerja sama tetap menjadi fondasi utama hubungan kedua pihak, tetapi mengalami fluktuasi. Ketergantungan KRG pada jalur ekspor minyak melalui Turki menjadi sumber tekanan diplomatik. Pada tahun 2023, akibat sengketa

hukum antara Baghdad dan Ankara terkait ekspor minyak Kurdistan tanpa persetujuan pemerintah pusat Irak, jalur ekspor Ceyhan sempat ditutup untuk beberapa bulan (Rasheed & Edwards, 2023).

Meski begitu, pada akhir 2024, hubungan perdagangan mulai pulih dengan tercapainya kesepakatan tripartit antara Baghdad, Erbil, dan Ankara mengenai mekanisme distribusi pendapatan minyak. Dalam kerangka ini, KRG harus bernegosiasi tidak hanya dengan Turki, tetapi juga dengan Baghdad. Hal ini menunjukkan bahwa ruang otonomi KRG dalam hubungan eksternal semakin menyempit (Karim & Aziz, 2024). Hubungan Turki–KRG tetap dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti ketegangan Turki–Iran dan perubahan kebijakan Amerika Serikat di kawasan. KRG berusaha menjaga keseimbangan antara tuntutan Turki dan hubungan tradisionalnya dengan Barat, meskipun dalam praktiknya, keterikatan ekonomi dan keamanan dengan Ankara semakin mendominasi arah kebijakan luar negeri KRG (Gunter, 2019).

2.3.4. Amerika Serikat

Pada awal periode ini, hubungan antara AS dan KRG tetap erat pada kerja sama keamanan, khususnya dalam operasi kontra-terorisme melawan sisa-sisa ISIS di wilayah utara Irak. Pasukan Peshmerga terus menerima pelatihan, bantuan persenjataan terbatas, serta dukungan intelijen dari militer Amerika Serikat. Keberadaan pasukan AS di pangkalan militer di dekat Erbil memperkuat persepsi bahwa KRG tetap menjadi wilayah mitra yang dapat diandalkan di tengah ketidakstabilan politik Irak setelah perang melawan ISIS (Doski, 2023).

Namun, seiring dengan keputusan politik Amerika untuk mengurangi keterlibatan militernya di Timur Tengah, termasuk pengurangan jumlah pasukan di Irak setelah 2020, dukungan terhadap KRG juga mengalami penurunan kuantitatif dan

kualitatif. Pemerintahan AS, baik di bawah Presiden Donald Trump maupun Joe Biden, mengadopsi kebijakan penekanan beban keamanan ke tangan pemerintah lokal Irak. Hal ini berdampak langsung pada kapasitas KRG dalam mempertahankan otonomi keamanan dan stabilitas regionalnya (Rodgers, 2025).

Pada saat yang sama, Amerika Serikat berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungannya dengan pemerintah pusat Irak di Baghdad. Washington semakin berhati-hati untuk tidak terlalu memperkuat KRG secara politik agar tidak merusak hubungan diplomatiknya dengan pemerintah federal Irak, yang tetap menjadi aktor kunci keamanan regional dan pengelolaan sumber daya energi di Timur Tengah. Oleh karena itu, bantuan kepada Peshmerga setelah 2019 sebagian besar disalurkan melalui koordinasi dengan Kementerian Pertahanan Irak, bukan secara langsung kepada KRG (Menmy, 2023).

Hubungan AS–KRG juga dipengaruhi oleh ketegangan antara AS dan Iran. Setelah serangan udara Amerika yang menewaskan Qassem Soleimani di Baghdad pada awal 2020, ketegangan di Irak meningkat drastis. KRG berusaha menjaga posisi netral, berupaya tidak terjebak dalam konfrontasi langsung antara AS dan kelompok-kelompok milisi Syiah pro-Iran (Hamaxan & Hussein, 2024). Hal ini memperlihatkan keterampilan diplomasi KRG dalam menavigasi kondisi geopolitik Timur Tengah yang rapuh. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya bergantung pada perlindungan Amerika seperti pada masa sebelumnya.

Di sisi ekonomi, kerja sama KRG dengan Amerika Serikat tetap berjalan, terutama dalam bentuk investasi swasta dan dukungan terhadap sektor energi. Perusahaan-perusahaan energi AS yang berbasis di Kurdistan, seperti HKN Energy, tetap aktif dalam eksplorasi dan produksi minyak di wilayah Kurdistan. Walaupun begitu, mereka menghadapi tantangan hukum dari pemerintah pusat Irak yang

mengklaim wewenang atas seluruh produksi minyak di negara itu setelah putusan Mahkamah Agung Irak tahun 2022. Oleh sebab itu, mereka melalui Association of the Petroleum Industry of Kurdistan (APIKUR), terus menyuarakan dan menekan Baghdad untuk membuka kembali jalur pipa ke Ceyhan (Dri, 2025). Secara politik, Amerika Serikat terus mendorong KRG untuk memperkuat reformasi internal, termasuk integrasi pasukan Peshmerga di bawah satu komando yang profesional dan mengurangi ketergantungan pada struktur militer berbasis partai. AS juga mendukung upaya mediasi antara KDP dan PUK untuk mengurangi fragmentasi internal yang melemahkan posisi politik KRG di tingkat nasional dan internasional (Saleem & Skelton, 2020).

Namun, pada periode ini, AS membatasi kontribusinya terhadap aspirasi jangka panjang KRG. Tidak ada indikasi bahwa Washington akan mendukung upaya kemerdekaan Kurdi atau memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah unilateral KRG dalam politik energi atau keamanan. Amerika Serikat lebih memilih mempertahankan KRG sebagai bagian dari Irak federal yang stabil dan bersatu, sesuai dengan kebijakan “*One Iraq Policy*” yang terus dipegang sejak 2003 (Heras, 2020).

Secara keseluruhan, hubungan antara Amerika Serikat dan Kurdistan Irak selama periode 2019–2025 ditandai oleh pragmatisme strategis dengan batasan politis. Amerika Serikat tetap memandang KRG sebagai mitra penting dalam stabilisasi Irak dan memerangi ekstremisme (Hiltermann, 2023). Bagi KRG, hubungan ini tidak hanya vital, tetapi juga menunjukkan bahwa dukungan Washington tidak lagi tanpa syarat dan harus diimbangi dengan upaya diversifikasi hubungan internasional dan reformasi internal yang berkelanjutan.

2.3.5. Israel

Setelah 2018, posisi KRG melemah akibat hilangnya kendali atas wilayah strategis seperti Kirkuk dan pembatasan ekonomi yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak. Israel tetap menjadi salah satu sedikit negara yang secara moral dan politis mendukung aspirasi nasionalisme Kurdi, meskipun dalam praktiknya keterlibatan langsung Israel sangat terbatas. Dukungan Israel lebih bersifat simbolik ketimbang material, berfokus pada pemberian dukungan politik di forum-forum internasional dan melalui media, dengan tujuan menjaga relevansi isu Kurdi dalam wacana geopolitik Timur Tengah (Khadim, 2021).

Dalam bidang energi, meskipun data ekspor sulit diverifikasi sepenuhnya karena sensitivitas perdagangan minyak KRG. Israel menjadi konsumen penting minyak dari Kurdistan Irak terutama melalui perantara di Turki dan Mediterania. Hal ini memberikan KRG sumber pendapatan penting di tengah pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat Irak terhadap ekspor minyak Kurdi (Amwaj.media, 2020). Namun, perdagangan ini dilakukan dengan sangat hati-hati karena tekanan diplomatik dari Irak, Iran, dan bahkan sebagian elemen dalam Turki.



Gambar 2.4. Jalur Pipa Minyak yang Menghubungkan Kurdistan Irak dengan Israel

(Amwaj.media, 2020).

Dalam sektor keamanan dan intelijen, hubungan Israel–KRG tetap berjalan secara terbatas dan tertutup. Israel tetap memberikan dukungan intelijen terbatas kepada elemen-elemen dalam KRG, khususnya memantau aktivitas Iran dan milisi pro-Iran di Irak utara. Selain itu, KRG dianggap berkontribusi dalam berbagi informasi terkait gerakan milisi Syiah dan operasi Iran di kawasan perbatasan Irak–Iran, yang menjadi perhatian utama bagi keamanan nasional Israel dalam menghadapi ekspansi regional Tehran (Saleh, 2025).

Namun, hubungan ini juga menghadapi tantangan besar. Setelah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran sejak 2020. Apalagi hubungan antara Iran dengan Barat menjadi sangat buruk pasca pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad. Iran juga memperketat pengawasannya terhadap aktivitas Israel di wilayah Irak, termasuk di wilayah Kurdistan. Iran menuduh KRG, terutama pihak-pihak di sekitar Erbil, memberikan fasilitas atau dukungan kepada elemen-elemen intelijen Israel, tuduhan yang secara resmi dibantah oleh KRG namun tetap memperburuk hubungan dengan Tehran (Radpey, 2024).

Ketegangan ini mencapai puncaknya dalam beberapa insiden, termasuk serangan rudal Iran terhadap "target strategis" di wilayah Erbil pada tahun 2022-2024, yang oleh Tehran diklaim sebagai upaya untuk menghantam pusat-pusat operasi Israel di Kurdistan Irak. Serangan ini menunjukkan bahwa meskipun Israel dan KRG berusaha menjaga hubungan mereka dalam kerahasiaan, keberadaan Israel di Irak utara tetap menjadi sumber instabilitas geopolitik yang serius (Sharp, 2024).

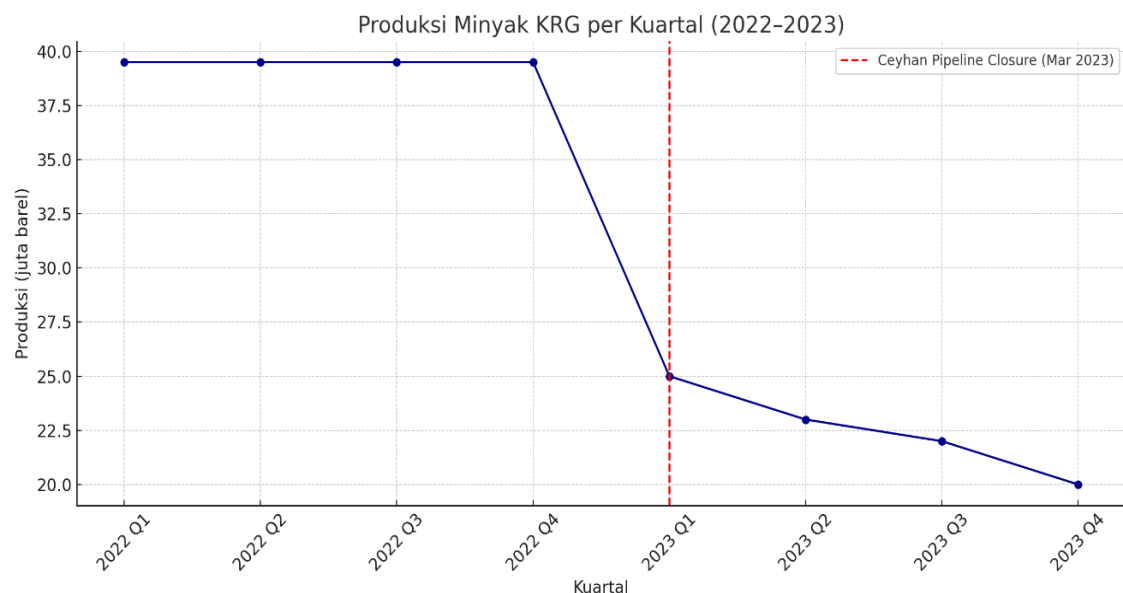
Di dalam tubuh KRG sendiri, hubungan dengan Israel juga menjadi isu politik sensitif di dalam Kurdistan sendiri. Meskipun faksi KDP lebih terbuka terhadap kerja sama dengan Israel, tetapi faksi-faksi lain, khususnya yang dekat dengan Iran seperti PUK, menunjukkan sikap yang lebih skeptis dan cenderung menentang peningkatan

hubungan yang dapat memicu tekanan dari Baghdad dan Tehran. Hal ini mencerminkan fragmentasi internal di tubuh KRG terkait arah kebijakan luar negeri dan hubungan dengan kekuatan eksternal (Jaff, 2022).

2.4. Isu Keamanan Energi di Kurdistan Irak

Isu keamanan energi menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh KRG dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan otonomi politiknya. Ketergantungan besar KRG terhadap sektor energi, khususnya minyak bumi. Hal tersebut membuat wilayah ini sangat rentan terhadap tekanan politik domestik, campur tangan eksternal, serta fluktuasi pasar global. Dinamika keamanan energi di Kurdistan Irak pasca 2018 memperlihatkan pola ketergantungan struktural, konflik legal, dan tekanan geopolitik yang semakin kompleks (Nazarova, 2022).

Grafik 2.1. Grafik Penurunan Produksi Minyak oleh KRG Akibat Penutupan Jalur Pipa Kirkuk-Ceyhan.



(Sumber: Baban dan diolah oleh Penulis, 2024).

Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwasannya terjadi penurunan produksi minyak secara drastis yang dimulai sejak kuartal pertama tahun 2023. Hal ini terjadi karena ditutupnya jalur pipa Kirkuk-Ceyhan pada Maret 2023 setelah putusan arbitrase ICC. Jalur pipa ini merupakan satu-satunya rute ekspor utama KRG ke pasar internasional melalui Turki. Ankara terpaksa menghentikan aliran minyak yang sudah berjalan sejak akhir 2013. Tindakan tersebut menyebabkan penurunan drastis dari sekitar 400.000 barel per hari menjadi hampir nol dalam beberapa bulan. Dampak langsung dari penutupan ini terlihat dalam krisis pendapatan KRG, tertundanya gaji pegawai, dan meningkatnya tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan politik internal. Data dalam grafik memperkuat argumen bahwa infrastruktur energi merupakan *referent object* yang rentan dan strategis dalam konstruksi ancaman eksistensial KRG terhadap otonominya (Baban, 2024).

Isu utama dalam sektor energi adalah sengketa antara KRG dan pemerintah pusat Irak terkait hak atas produksi dan ekspor minyak. Setelah Mahkamah Agung Irak pada tahun 2022 mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa hukum minyak dan gas Kurdistan bertentangan dengan konstitusi federal, pemerintah pusat Irak menuntut agar semua aktivitas energi KRG diawasi dan dikontrol oleh Baghdad. Putusan ini memberikan dasar hukum bagi Baghdad untuk menantang kontrak ekspor minyak KRG dan menuntut pengalihan pendapatan ekspor ke kas nasional (Bentley et al., 2022).

Dampak dari sengketa ini sangat besar. Pada tahun 2023, sebagai hasil tekanan dari pemerintah pusat Irak melalui arbitrase internasional, jalur ekspor minyak KRG melalui pelabuhan Ceyhan di Turki sempat ditutup selama beberapa bulan. Penutupan ini menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi KRG. Melihat data grafik di atas, dapat diartikan bahwasannya penutupan jalur pipa tersebut berdampak besar terhadap performa KRG dalam menghasilkan minyak bumi. Hal ini menyebabkan perekonomian

Kurdistan Irak yang sudah turun menjadi anjlok parah (Baban, 2024). Krisis ini memperlihatkan kerapuhan struktur ekonomi Kurdistan yang terlalu bergantung pada satu komoditas dan rute ekspor tunggal (Dahan et al., 2025).

Di sisi lain, hubungan KRG dengan Turki sebagai jalur utama ekspor minyak juga mengalami tekanan. Turki memang memiliki kepentingan ekonomi untuk mempertahankan aliran minyak dari Kurdistan Irak. Akan tetapi, Ankara menggunakan isu ekspor ini sebagai alat negosiasi terhadap KRG dalam isu-isu lain, termasuk kerja sama keamanan melawan PKK (Dudlak, 2024). Selain itu, ketegangan antara Baghdad dan Ankara atas ekspor minyak Kurdistan menempatkan Erbil dalam posisi sulit. Sehingga, KRG terjepit antara dua kekuatan yang memegang pengaruh besar terhadap masa depan sektor energinya.

Selain ancaman hukum dan politik, keamanan fisik infrastruktur energi di wilayah Kurdistan Irak juga menjadi isu krusial. Fasilitas-fasilitas penting seperti jalur pipa, ladang minyak, dan kilang menjadi target serangan dari berbagai aktor bersenjata non-negara, termasuk kelompok ISIS yang tetap aktif di daerah-daerah perbatasan. Meskipun operasi militer terus dilakukan untuk mengamankan wilayah-wilayah produksi energi, tetapi risiko serangan tetap tinggi. Hal ini kemudian meningkatkan biaya keamanan bagi perusahaan-perusahaan energi yang beroperasi di wilayah tersebut (van Wilgenburg, 2022).

Ketidakstabilan keamanan ini juga diperburuk oleh fragmentasi internal di tubuh KRG, khususnya rivalitas antara KDP dan PUK. Rivalitas tersebut yang kadang-kadang menyebabkan ketidakefisienan dalam koordinasi perlindungan infrastruktur energi lintas wilayah administrasi. Misalnya, wilayah yang dikendalikan oleh PUK di sekitar Kirkuk dan Halabja memiliki koordinasi keamanan yang jauh berbeda

dibandingkan dengan wilayah yang dikendalikan oleh KDP di Erbil dan Dohuk (Hama, 2024).

Dalam upaya mengatasi ketergantungan tunggal pada minyak, KRG berusaha mendiversifikasi sektor energinya. Sejak 2019, terdapat beberapa proyek untuk mengembangkan sektor gas alam, baik untuk penggunaan domestik maupun untuk ekspor. KRG juga menandatangani beberapa perjanjian kerja sama baru dengan perusahaan energi internasional, termasuk dari AS, Rusia, dan UEA. Proyek-proyek tersebut bertujuan untuk mengembangkan ladang gas dan meningkatkan kapasitas produksi energi (Watkins, 2019). Namun, proyek-proyek ini menghadapi hambatan regulasi, kurangnya pendanaan infrastruktur, serta ancaman tekanan dari Baghdad yang menuntut semua kesepakatan energi harus mendapat persetujuan federal (Smeekens & Keil, 2022).

Secara regional, KRG juga menghadapi resiko geopolitik terkait energi. Iran, yang memandang hubungan KRG dengan Israel dan AS dengan penuh kecurigaan, telah beberapa kali menuduh bahwa instalasi-instalasi energi di Kurdistan Irak digunakan untuk aktivitas spionase. Tehran lantas menggunakan tuduhan ini sebagai justifikasi untuk melakukan serangan rudal lintas batas ke wilayah dekat fasilitas energi di Erbil. Hal ini kemudian turut menambah dimensi keamanan dalam pengelolaan sektor energi di Kurdistan (Frantzman, 2025).

Sektor energi lantas menjadi salah satu aspek krusial dalam geopolitik Kurdistan Irak. Minyak dan gas merupakan sumber utama pendapatan bagi KRG, tetapi pengelolaannya sering kali menjadi sumber ketegangan dengan Baghdad. Pemerintah pusat Irak menuntut kontrol atas sumber daya energi Kurdistan Irak, sementara KRG berupaya mempertahankan otonomi dalam pengelolaannya. Sengketa ini diperburuk oleh keputusan Mahkamah Agung Irak pada tahun 2022 yang menguntungkan Baghdad

(Nurdiansah, 2023). Perselisihan ini telah menimbulkan ketegangan yang menyulitkan kemampuan wilayah tersebut untuk mengekspor sumber dayanya secara independen dan memastikan aliran pendapatan yang stabil.

Upaya KRG untuk membangun kebijakan ekspor energi yang independen semakin rumit akibat tekanan eksternal dan masalah tata kelola internal. Ketergantungan Erbil terhadap ekspor minyak sebagai sumber utama pendapatan membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Alhasil, ketergantungan ini juga dapat berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik. Selain itu, kurangnya infrastruktur yang kuat dan struktur tata kelola yang memadai turut melemahkan kelanjutan jangka panjang dari strategi energi mereka (Tinti, 2021, 175-176). Dengan demikian, isu keamanan energi menjadi momok menakutkan bagi para elit politik di Erbil.